

**DESKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG PEMEKARAN
WILAYAH PEKON TAMBAHREJO BARAT**

(JURNAL)

Oleh

Jepri Rison Wardana



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

DESCRIPTION OF FACTORS WHICH SUPPORT THE REGION EXPANSION TAMBAHREJO BARAT VILLAGE

Jepri Rison Wardana¹⁾ Sudarmi²⁾ Rahma Kurnia Sri U³⁾

This research aimed to know the suitability between the factors supporting the region expansion of Tambahrejo Barat village. The focus was on the importance of planning in the region expansion by describing (1) the physical aspects, including: factors of an area, the boundaries of the region, and the infrastructure of the village (2) the aspects of non-physical factors, which include: the number of inhabitants, the aspirations of the community of the village, and the economic potential of the village. The method used descriptive method. The number of respondents were 15 people. Data collection technique was using the method of observation, interviews, literature study, and documentation. The analysis of the data used was descriptive qualitative data analysis. The results of this research showed that the factors supporting the region expansion of Tambahrejo Barat village reviewed from the physical aspects and non-physical aspects is in compliance with the provisions of the terms of the expansion of the village.

Keywords: *supporting factors, region expansion, tambahrejo barat village.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara faktor-faktor pendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat. Fokus kajiannya adalah pentingnya perencanaan dalam pemekaran wilayah dengan mendeskripsikan tentang (1) aspek fisik, yang meliputi: faktor luas wilayah, batas wilayah, dan prasarana desa (2) aspek non fisik, yang meliputi: faktor jumlah penduduk, aspirasi masyarakat desa, dan potensi ekonomi desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Jumlah responden sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat yang ditinjau dari aspek fisik dan aspek non fisik sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan pemekaran desa.

kata kunci: faktor pendukung, pemekaran wilayah, pekon tambahrejo barat.

¹ Mahasiswa Pendidikan Geografi

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

berdasarkan data yang diperoleh dari Rahardjo Adisasmita (2013: 17-18) bahwa “Sekitar 65 persen penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan. Sisanya sekitar 35 persen berada di daerah perkotaan. Tingkat kepadatan penduduk di daerah pedesaan relatif sangat rendah dibandingkan di daerah perkotaan, sehingga luas daerah pedesaan mencapai lebih dari 70 persen”. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa sangat penting karena pembangunan nasional bermula dari pembangunan desa.

Pemekaran desa adalah suatu bentuk pengembangan wilayah desa dengan cara membentuk desa baru dari desa yang telah ada. Dilihat dari segi pengembangan wilayah, calon desa baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya alam yang seimbang antara yang satu dengan yang lain. Perlunya sumber daya alam seimbang adalah agar setelah desa tersebut dimekarkan kelak benar-benar akan mengalami perkembangan seperti yang telah direncanakan.

Desa/Pekon Tambahrejo merupakan salah satu dari 7 pekon yang terdapat di Kecamatan Gadingrejo. Sebelum dimekarkan, Pekon Tambahrejo yang merupakan desa induk dari Pekon Tambahrejo Barat memiliki luas wilayah 401 Ha.

Wilayah desa yang luas tersebut menimbulkan berbagai masalah dalam lingkup kehidupan masyarakat desa seperti rentang kendali. Jarak antar dusun ataupun dari dusun ke kantor pemerintahan desa yang jauh

telah menghambat masyarakat desa untuk memperoleh pelayanan desa.

Faktor aksesibilitas yang tidak memadai pun menjadi penghambat dalam aktivitas masyarakat desa. Aksesibilitasnya yang sulit dipengaruhi oleh jarak, kondisi jalan, dan bentuk topografinya (morfologi) yang berbukit. Jarak yang lebih jauh dari wilayah lain dipengaruhi oleh lokasi yang berada paling jauh dan paling tepi di wilayah pekon tersebut. Topografi yang berbukit mempengaruhi kondisi waktu tempuh dan kondisi medan yang akan dilalui. Kondisi medan jalan yang berbukit mempengaruhi tekstur jalan yang lunak dan seringkali ditemui jalan berbatu yang tidak rata sehingga dalam perjalanannya mempengaruhi waktu tempuh yang lebih lama dari yang seharusnya.

Ditambah lagi masih terdapatnya kawasan pedesaan yang tertinggal akibat belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi pedesaan yang bertumpu pada keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sebagai basis ekonomi dalam pembangunan pedesaan, serta manajemen pembangunan yang berorientasi pada sentralisasi

Masalah lain yang juga timbul adalah belum optimalnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan. Keadaan yang demikian dapat mendorong masyarakat desa untuk melahirkan aspirasi-aspirasi baru yang mendukung pembangunan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendagri No. 28 Tahun 2006 jumlah penduduk desa

minimal 1.000 jiwa, apabila jumlah penduduk desa kurang dari jumlah tersebut dapat menimbulkan masalah dalam keberlangsungan perkembangan desa. Kualitas sumberdaya manusia juga sangat penting bagi sumbangsih kemajuan desa. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola potensi desa yang ada secara efektif dan berdaya guna, apabila potensi desa dapat dikelola dengan baik maka sumberdaya manusianya dapat dikatakan baik

Kondisi desa juga dihadapkan dengan belum meratanya faktor penyediaan prasarana pelayanan masyarakat ke seluruh bagian desa. Sarana dan prasarana kurang menjangkau tiap bagian desa. Fasilitas sarana dan prasarana hanya terdapat di pusat-pusat desa tertentu yang dekat dengan keramaian

Untuk mencari solusi dari permasalahan desa tersebut, Pekon Tambahrejo Barat melakukan pemekaran pada tahun 2012 dari Pekon Tambahrejo. Pekon Tambahrejo Barat adalah salah satu desa yang secara administratif merupakan bagian wilayah Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Hal di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan di dalam Pekon Tambahrejo yang mendorong Pekon Tambahrejo Barat untuk memekarkan wilayahnya. Pemekaran wilayah dapat dilakukan bukan hanya karena alasan adanya permasalahan di dalam wilayah tersebut, melainkan juga karena kesesuaian atau terpenuhinya faktor-

faktor pendukung dalam wilayah tersebut

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara faktor-faktor pendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat yang ditinjau dari aspek fisik (luas wilayah, batas wilayah, dan prasarana pembangunan) dan aspek non fisik (jumlah penduduk, aspirasi masyarakat, dan potensi ekonomi) dengan ketentuan persyaratan pemekaran desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Mohammad Nazir (1983: 63), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek suatu kondisi suatu sistem pemikiran atau pun suatu peristiwa pada masa sekarang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang tinggal di 3 (tiga) dusun Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2015.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85).

Responden sebagai sampel dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi 1 (satu) kepala pekon, 3 (tiga) kepala dusun, 3 (tiga) tokoh masyarakat setempat, dan 8 (delapan) warga masyarakat

setempat dengan jumlah total sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur menggunakan pedoman wawancara, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara penelitian terdiri dari 5 pertanyaan yang dapat dikembangkan untuk mendapat informasi-informasi yang akurat. Observasi yang dilakukan untuk memperkuat dan menunjang data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman adalah (1) reduksi data (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (Muhammad Idrus, 2009: 148).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Fisikal

Luas Wilayah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui dokumentasi penelitian, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Pekon Tambahrejo dan Tambahrejo Barat Setelah Pemekaran Tahun 2012

No	Nama Pekon	Luas Pekon (Ha)
1	Tambahrejo	252
2	Tambahrejo Barat	149
Jumlah		401

Sumber: Penelitian Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum terjadinya pemekaran pada tahun 2012, Pekon Tambahrejo pada awalnya memiliki luas wilayah 401 Ha. Pemekaran Tahun 2012 menyebabkan berkurangnya luas wilayah Pekon Tambahrejo menjadi 252 Ha. Hal itu diakibatkan sebagian wilayah Pekon Tambahrejo telah memutuskan untuk memekarkan diri menjadi sebuah pekon dengan nama Pekon Tambahrejo Barat yang seluas 149 Ha.

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh S.D. Misra dalam Totok Gunawan (2007: 103) yang menyatakan bahwa desa/pekon adalah tempat tinggal dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 sampai 1.000 Ha. Pekon Tambahrejo Barat yang memiliki luas 149 Ha telah memenuhi syarat luas wilayah.

Luas wilayah berkaitan dengan rentang kendali antar dusun menuju ke pusat pemerintahan pekon. Untuk lebih jelasnya mengenai rentang kendali pekon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jarak Perdusun Pekon Tambahrejo Sebelum Pemekaran Pekon Tambahrejo Barat kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2012

No	Dusun	Jarak Ke Pusat Pekon (Km)
1	Dusun VIII	1,5
2	Dusun VII	1
3	Dusun VI	0,8
4	Dusun I	0,8
5	Dusun II	0,5
6	Dusun IV	0,5
7	Dusun V	0,4
8	Dusun III	0

Sumber: Monografi Pekon Tambahrejo Tahun 2012

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa jarak terjauh dari pusat Pekonambahrejo adalah dusun VIII, sedangkan jarak terdekat adalah Dusun III. Dusun VI, VII, dan VIII yang merupakan calon wilayah Pekonambahrejo Barat memiliki rentang kendali pemerintahan yang paling jauh.

Tabel 3. Jarak Perdesun Pekonambahrejo Barat Setelah Pemekaran Tahun 2012

No	Dusun	Jarak Ke Pusat Pekon (Km)
1	Dusun III	0,5
2	Dusun I	0,3
3	Dusun II	0

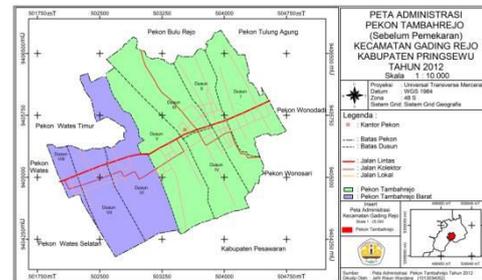
Sumber: Monografi Pekonambahrejo Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa setelah adanya pemekaran Pekonambahrejo Barat jarak rentang kendali perdesun ke pusat pekon menjadi lebih dekat.

Jarak yang lebih dekat akan membuat koordinasi antar dusun ke pusat pekon akan lebih baik dan pusat pelayanan pekon akan mudah terkordinir. Hal ini sesuai dengan pendapat Mutalib dalam Ike Yukowati (2013: 12) yang menyatakan bahwa “Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil adalah areal yang tepat untuk pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit, pemerintahan lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani, partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka, konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi dengan masyarakat, pengawasan menjadi lebih mudah

karena wilayah pengawasan yang relatif sempit.”

Gambar 1. Peta Pemekaran Pekonambahrejo Barat



Batas Wilayah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui dokumentasi penelitian di Pekonambahrejo Barat didapat data batas-batas wilayah Pekonambahrejo Barat terhadap wilayah sekitarnya adalah: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Wates Timur (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Pekonambahrejo (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Wates dan Wates Selatan.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas desa, Batas wilayah desa merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik yang berupa batas alam maupun batas buatan. Kenampakan batas alami ditunjukkan pada batas selatan wilayah Pekonambahrejo Barat yang membatasi wilayah dengan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Batas selatan diwujudkan dengan bentang perbukitan. Kenampakan batas

buatan ditunjukkan pada batas utara, batas timur, dan batas barat wilayah Pekon Tambahrejo Barat yang ditandai melalui gapura, saluran air, dan saluran air.

Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa batas wilayah desa dapat dinyatakan dalam bentuk peta desa. Namun pada kenyataannya Pekon Tambahrejo Barat belum memiliki peta batas wilayah desa yang akurat, peta yang dimiliki desa masih berupa peta lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai batas wilayah pekon dapat disimpulkan bahwa batas-batas wilayah Pekon Tambahrejo Barat yang ada belum dapat dinyatakan dalam bentuk peta desa dengan jelas oleh pihak aparat Pekon Tambahrejo Barat. Hal ini sesuai pada penjelasan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pembuatan peta garis batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu. Namun dalam hasil penelitian ini data-data koordinat tersebut ternyata valid dan dapat digunakan dalam pembuatan peta dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor batas wilayah desa mendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2012.

Prasarana Desa

Prasarana pekon yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi prasarana pendidikan, prasarana keamanan dan kesehatan, prasarana peribadatan, prasarana pemerintahan, prasarana transportasi, dan prasarana olahraga. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan mengenai sarana pendidikan yang

ada di Pekon Tambahrejo Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Prasarana Pembangunan Desa di Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2015

Variabel	Indikator	Ketersediaan		Kondasi		Jumlah/ Ukuran	Ket.
		Ada	Tidak Ada	Terawat	Tidak Terawat		
Prasarana Pembangunan Desa	Prasarana Pendidikan						
	• PAUD	√		√		2	1 TK dan 1 kelompok bermain
	• SD/MI	√		√		1	
	• SMP/MTS		√				
	• SMA/SMK/MA	√			√	1	SMK tidak aktif
	• Perguruan Tinggi		√				
	• TPA (Taman Pengasihan Alquran)	√		√		4	Dusun I (1), Dusun II (2), Dusun III (1)
	Prasarana Keamanan Dan Kesehatan						
	• Rumah Sakit Klinik	√		√		1	RSIA
	• Puskesmas		√				
	• Puskesmas						
	• Poliklinik	√		√		1	
	• Garda Ronda	√		√		4	
	Prasarana Peribadatan						
	• Masjid	√		√		4	2 Masjid, 2 Mushola
	• Gereja		√				
	• Wihara		√				
	• Dura		√				
	• Kuli		√				
	Prasarana Pemerintahan						
• Kantor Pekon	√		√		1		
• Balai Pekon	√					Kantor pekon sebagai balai pekon	
Prasarana Transportasi							
• Jalan Aspal	√				1,5	Km	
• Jalan Onderdak	√				1,5	Km	
• Jalan Tanah		√					
Prasarana Olahraga							
• Lapangan Sepakbola		√					
• Lapangan Bolavoli	√			√	3	Unit	
• Lapangan Tenis meja	√			√	2	Unit	
• Lapangan badminton	√		√		1	Unit	

Sumber: Penelitian Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa seluruh jenis prasarana desa telah tersedia. Namun, dari setiap jenis prasarana tersebut tidak seluruhnya tersedia lengkap prasarananya, seperti prasarana pendidikan tersedia meliputi: jenjang PAUD, SD, SMK, dan TPA; dan yang tidak tersedia meliputi jenjang SMP dan perguruan tinggi. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di Pekon Tambahrejo Barat

Dalam memajukan wilayahnya Pekon Tambahrejo Barat memiliki visi yaitu memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pekon yang baru mengembangkan wilayahnya, program pembangunan fisik (sarana dan prasarana) merupakan salah satu prioritas utama

dalam pelaksanaan pembangunan Pekon Tambahrejo Barat. Hal itu seperti yang tertulis dalam salah satu misi Pekon Tambahrejo Barat yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum strategis dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Prasarana umum yang dimaksud adalah prasarana pendidikan, keamanan dan kesehatan, peribadatan, transportasi, olahraga, dan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang prasarana desa dapat disimpulkan bahwa dalam hal ketersediaan, faktor prasarana desa secara keseluruhan telah ada. Dari segi kondisi prasarana desa, ada 1 prasarana yaitu prasarana olahraga yang kondisinya cenderung tidak terawat. Namun, secara keseluruhan dalam kondisi terawat, sehingga dapat disimpulkan keseluruhan faktor prasarana desa telah ada dan mendukung dalam pemekaran Pekon Tambahrejo Barat.

Aspek Non Fisikal

Jumlah Penduduk

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui jumlah penduduk Pekon Tambahrejo Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2014

No	Letak Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Jumlah
			Pria	Wanita	
1	Dusun I	170	346	344	690
2	Dusun II	190	330	321	651
3	Dusun III	176	312	321	633
	Jumlah	536	988	986	1.974

Sumber: Monografi Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk paling banyak terdapat pada dusun I, hal ini berkaitan dengan luas wilayah, dusun I memiliki wilayah lebih luas dibandingkan dusun II dan III. Dusun I memiliki wilayah dengan lahan pertanian yang paling luas dibandingkan dusun II dan III.

Berdasarkan ketentuan syarat pemekaran yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 disebutkan bahwa syarat minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru untuk wilayah Sumatera paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga. Jika dilihat dari data jumlah penduduk Pekon Tambahrejo Barat sebanyak 1.974 jiwa atau 200 kk telah memenuhi syarat minimal jumlah penduduk. Jadi dapat disimpulkan faktor jumlah penduduk telah mendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat pada tahun 2012.

Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan responden dapat diketahui bahwa 14 dari 15 responden berpendapat positif mengenai pemekaran Pekon Tambahrejo Barat. Mereka yakin atas hasil positif dari pemekaran dan harapan yang akan membawa perubahan positif di lingkungan desa. Derasnya aspirasi masyarakat mengenai keinginan untuk memekarkan desa. 15 responden sepakat bahwa pemekaran Pekon Tambahrejo Barat memang keinginan warga masyarakat sendiri dan diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Setiap masyarakat yang menyetujui pemekaran Pekon Tambahrejo telah memiliki harapan masing-masing agar membawa perubahan menjadi lebih baik. Berdasarkan pendapat responden, harapan yang banyak timbul adalah mengenai pelayanan dari kantor pemerintahan pekon agar menjadi lebih mudah dan pembangunan di desa menjadi lebih cepat.

Berdasarkan 5 indikator pertanyaan dalam wawancara penelitian didapat hasil yang positif dari masing-masing indikator pertanyaan. Hampir seluruh responden berpendapat tentang keinginan dan tujuan yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa seluruh responden memang benar-benar mempunyai keinginan agar pemekaran Pekon Tambahrejo Barat dapat terlaksana dengan baik dan membawa dampak perubahan yang baik bagi seluruh penduduk.

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan dikuatkan teori dalam HAW Wijaya (2002: 45-46) yang menyebutkan bahwa desa dibentuk atas prakarsa dan kesepakatan masyarakat desa. Dilihat dari hasil seluruh pendapat responden, Pekon Tambahrejo Barat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut. Jadi faktor aspirasi masyarakat desa sudah mendukung dalam pemekaran Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2012.

Potensi Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, potensi ekonomi di Pekon Tambahrejo Barat yang dimanfaatkan masyarakat setempat, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Potensi ekonomi di Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2015

Variabel	Indikator	Ketersediaan		Keadaan		Jumlah/ Ukuran	Ket.
		Ada	Tidak Ada	Terawat	Tidak Terawat		
Potensi Ekonomi Desa	Potensi Kegiatan Ekonomi						
	• Bank		√				
	• Non Bank		√				
	• Koperasi		√				
	• Pasar		√				
	• Kompleks Pertokoan	√		√		1	Unit
	• Warung	√		√		63	Unit
	• Peternakan	√				5	Unit
	• Pertanian	√		√		14,5	Ha
	• Perikanan		√				
	• Industri rumah tangga	√		√		3	Unit
• Industri Menengah ke atas	√		√		2	Unit	
• Industri Besar		√					

Sumber: Penelitian Tahun 2015

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui terdapat berbagai potensi ekonomi di dalam Pekon Tambahrejo Barat yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber kegiatan perekonomian masyarakat. Warung merupakan tempat kegiatan ekonomi yang paling banyak yaitu sebanyak 63 unit. Kondisi alam yang ada mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat Pekon Tambahrejo Barat. Banyaknya jumlah warung menunjukkan bahwa banyaknya jumlah kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi. Banyaknya jumlah warung dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal ke pasar yang cukup jauh. Pasar hanya terdapat di ibukota kecamatan yang berjarak \pm 4 km.

Faktor lokasi dan topografi Pekon Tambahrejo Barat menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kedua faktor tersebut dapat saling berkaitan, maksudnya topografi yang berbukit menyebabkan lokasi pasar jauh dari tempat tersebut.

Pekon Tambahrejo Barat memiliki topografi yang datar namun berbukit. Adanya perbukitan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk membuka industri

menengah di 2 belahan bukit, yaitu industri tambang batu. Industri tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Pekon Tambahrejo Barat. Perbukitan yang memiliki banyak pepohonan juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beternak dengan sumber pangan ternak ada di dekat wilayah perbukitan. Selain itu, topografi yang datar juga dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk bertani sawah seluas 14,5 Ha.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi yang dimanfaatkan di Pekon Tambahrejo Barat meliputi pertanian (padi), warung, pertokoan, peternakan, industri rumah tangga, dan industri menengah ke atas (tambang batu). Pemanfaatan potensi ekonomi desa tersebut memang dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang ada yaitu terdiri dari dataran rendah sebagai lahan pertanian seluas 14,5 Ha dan perbukitan untuk tambang batu seluas 47 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi desa yang ada di Pekon Tambahrejo Barat telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik dan mendukung pemekaran Pekon Tambahrejo Barat.

Pemekaran Pekon Tambahrejo Barat Kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Pembentukan desa baru telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tiap faktor menurut aspeknya dapat dikatakan bahwa aspek fisik dan non fisik ternyata telah memenuhi syarat dan mendukung

pemekaran Pekon Tambahrejo Barat tahun 2012.

Hasil itu menghilangkan kecurigaan-kecurigaan atau asumsi-asumsi negatif dari pihak luar Pekon Tambahrejo Barat bahwa pemekaran Pekon Tambahrejo Barat dilakukan bukan semata-mata hanya untuk unsur politis dan jumlah bantuan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Talidizuhu Ndraha (1984: 44) yang mengatakan bahwa motif setiap pembentukan atau pemekaran desa haruslah benar-benar didasarkan efisiensi pemerintahan dan tidak sekedar didorong oleh keinginan untuk memperbanyak jumlah desa agar jumlah bantuan pembangunan desa bisa diterima lebih banyak pula.

Hasil yang berbeda akan terlihat apabila pemekaran Pekon Tambahrejo Barat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah terjadi perubahan syarat dalam faktor jumlah penduduk. Faktor jumlah penduduk yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 syarat jumlah penduduk wilayah Sumatera paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga dan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa syarat jumlah penduduk wilayah Sumatera berubah menjadi paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Apabila Pemekaran Pekon Tambahrejo Barat mengacu pada undang-undang yang sekarang maka tidak akan memenuhi syarat untuk faktor jumlah penduduk. Hasil itu juga sama apabila pelaksanaan pemekaran Pekon Tambahrejo ditunda maka kemungkinan pada

tahun 2014 tidak akan bisa dimekarkan.

Pemekaran Pekon Tambahrejo Barat Kaitannya dengan Aspek Politis

Wacana pemekaran kecamatan baru di dalam wilayah kecamatan Gadingrejo telah menyeruak sampai ke masyarakat. Pemekaran kecamatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dijelaskan bahwa untuk wilayah kecamatan paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat mungkin sekali bahwa Pemekaran Pekon Tambahrejo Barat di Kecamatan Gadingrejo adalah dalam rangka mempersiapkan wilayah kecamatan baru yang menurut rencana adalah Kecamatan Wates.

Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa pemekaran Pekon Tambahrejo Barat diikuti oleh Pemekaran dari 3 pekon lain yaitu Pekon Wates Timur, Wates Selatan, dan Wonosari. Dengan demikian jumlah pekon di Kecamatan Gadingrejo sebanyak 19 Pekon. Hal itu kemungkinan masih akan ada pemekaran di beberapa pekon lainnya mengingat belum terpenuhinya syarat jumlah pekon dalam pembentukan kecamatan baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat yang ditinjau dari aspek fisik dan non fisik sudah

sesuai dengan ketentuan persyaratan pemekaran desa.

Agar aspek fisik dan non fisik dapat selalu sesuai dalam mendukung pemekaran wilayah sebaiknya: (1) Bagi pihak pemerintah yang menjadi pelaksana pemekaran hendaknya selalu teliti dalam melakukan pengawasan dan penelitian terhadap wilayah yang akan dimekarkan, sebab dapat muncul kemungkinan ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan dalam mendukung pemekaran. (2) Bagi pihak aparat Pekon Tambahrejo Barat hendaknya harus selalu memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan yang ada dalam melakukan pemekaran karena peraturan yang ada, sebab standar peraturan tersebut tentunya telah memperhatikan berbagai pertimbangan yang baik untuk kepentingan seluruh masyarakat desa. Pada dasarnya pemekaran wilayah seharusnya tidak dapat dilakukan hanya karena mempertimbangkan satu sudut pandang masyarakatnya, melainkan harus melihat sudut pandang kelayakan dalam syarat-syarat pemekaran menurut peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Gunawan, T. 2007. *Fakta dan Konsep Geografi*. Jakarta. Inter Plus.

- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta. Erlangga.
- Nazir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bina Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wijaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Yukowati, I. 2011. Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan Baru Di Kabupaten Majalengka. *Skripsi*. Bandung. Jurusan Pendidikan Geografi. FPIPS. Universitas Pendidikan Indonesia.